

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1. Kajian Pustaka

Beberapa konsep pendukung penelitian ini antara lain teori-teori terkait upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan desa dalam pengelolaan sumber pangan rumah tangga. Penelitian ini fokus pada studi kasus PKK di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya melalui berbagai kegiatan, program, bantuan dan kebijakan yang menjawab inti permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penguatan potensi dan kemampuan masyarakat untuk mencapai kemandirian. Pemberdayaan ini juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat baik dalam kelompok formal maupun informal, dimana mereka bekerja sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 47).

Transformasi masyarakat lokal melalui proses peningkatan kapasitas harus fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan peran mereka dan mengembangkan metode berbeda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengorganisasikan kemampuan dan

potensinya harus dibarengi dengan upaya peningkatan aspek perekonomian.

Pengembangan masyarakat telah lama menjadi tujuan. Masyarakat harus dipercaya untuk mengelola atau melaksanakan program yang sesuai dengan standar regional dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan dalam organisasi masyarakat. Pada dasarnya, keberlanjutan suatu program di bidang ini meningkat ketika individu atau kelompok menjadi penggeraknya.

Menurut Ife (1995) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019), pemberdayaan mempunyai dua makna pokok yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Otoritas disini tidak hanya mengacu pada otoritas politik dan pengambil keputusan, namun juga kekuasaan atau pengaruh terhadap pelanggan; Patron dapat berupa dermawan atau masyarakat dari kalangan bawah.

2.1.1.2 Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Axinn (1988) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2019:159), pendekatan diartikan sebagai suatu gaya yang harus ditentukan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu sistem tertentu. Pendekatan ini dapat diibaratkan dengan ritme musik yang harus diikuti oleh alat musik lainnya. Selain itu, pendekatan ini berimplikasi pada penciptaan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh penerima kegiatan. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membangun komunitas adalah:

- 1) Tujuan yang diharapkan dicapai melalui upaya peningkatan kapasitas.
- 2) Metode transfer teknologi yang akan diterapkan dalam sistem.
- 3) Upaya pengembangan sumber daya manusia/fasilitator untuk melaksanakan program pelatihan.
- 4) Pilihan organisasi untuk melaksanakan pemberdayaan.

Cara ini dikenal juga dengan pendekatan sistemis dimana penerima manfaat berfokus pada perubahan yang berdampak pada keseluruhan

sistem lingkungan. Beberapa strategi yang termasuk dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, kegiatan sosial, advokasi, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik. Pendekatan ini memandang penerima manfaat sebagai individu yang mempunyai kapasitas untuk memahami situasi mereka sendiri dan memilih serta menentukan strategi tindakan yang tepat. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada penerima manfaat untuk melaksanakan program sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Hal ini membuat program bekerja secara efisien. Terkait dengan filosofi pemberdayaan, terdapat beberapa metode pemberdayaan, seperti:

- 1) Pendekatan partisipatif selalu menekankan peran masyarakat sebagai pusat upaya pemberdayaan, antara lain:
- 2) Pemberdayaan selalu ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, bukan mencapai tujuan entitas atau otoritas eksternal.
- 3) Semua pilihan mengenai kegiatan, metode dan teknologi peningkatan kapasitas harus didasarkan pada preferensi masyarakat.
- 4) Penilaian keberhasilan pemberdayaan tidak bergantung pada standar fasilitator atau pihak eksternal, namun pada tindakan yang diakui oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
- 5) Pendekatan kesejahteraan menekankan bahwa setiap kegiatan, sumber daya dan teknologi yang dilaksanakan harus memberikan manfaat yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
- 6) Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berkelanjutan tanpa menimbulkan ketergantungan, namun harus memberdayakan masyarakat penerima manfaat agar suatu saat dapat mandiri untuk melanjutkan proses pemberdayaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

2.1.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus bertumpu pada teknik kerja tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Ini adalah proses dan produk yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan alat pengumpulan data dengan menggunakan informasi penelitian terdahulu, referensi yang tersedia, dan hasil observasi lapangan.
- 2) Mendorong pemahaman dan komitmen untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan seluruh masyarakat.
- 3) Membangun sistem informasi, menganalisis sistem, melaksanakan intervensi, pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat, keluarga dan komunitas.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif perlu dirancang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya kebutuhan penerima manfaat atau sasaran dari program itu sendiri. Disamping itu strategi pemberdayaan masyarakat harus melibatkan kaum perempuan dan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari sisi kontribusi, bahwa perempuan sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat pedesaan tetapi masih saja minim dilibatkan dalam agenda pertemuan-pertemuan pemberdayaan masyarakat. Selain kaum perempuan, generasi muda juga sangat penting dipersiapkan guna menciptakan generasi penerus yang menjadi harapan dalam menggantikan estafet kepemimpinan guna melanjutkan pembangunan khususnya di ranah pemberdayaan masyarakat. Dengan dijadikannya Kaum perempuan dan generasi muda sebagai motor penggerak maka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan terus berjalan walaupun sudah ditinggalkan oleh Fasilitator atau pemangku kebijakan.

2.1.1.4 Tahapan Kegiatan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilkinson (Sumaryadi, 2004) dalam Mardikanto Soebiato, kegiatan peningkatan kapasitas setiap anggota organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang meliputi:

- 1) Membangkitkan kemauan untuk berubah dan memperbaiki diri merupakan titik awal yang penting dalam pemberdayaan.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kenyamanan atau hambatan yang ada dan mengambil keputusan untuk melakukan pemberdayaan guna mewujudkan perubahan dan perbaikan.
- 3) Mengembangkan keinginan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
- 4) Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang terbukti bermanfaat.
- 5) Meningkatkan keterlibatan dan loyalitas dalam kegiatan pemberdayaan.
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.
- 7) Tingkatkan keterampilan kepemimpinan perubahan Anda melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Tim Pelaksana (2004) memaparkan dalam Mardikanto dan Soebiato tahapan proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari identifikasi lokasi hingga tercapainya kemandirian dari masyarakat. Berikut rincian rinci dari setiap langkah:

1) Tahap Seleksi Lokasi

Pemilihan lokasi regional didasarkan pada standar yang disetujui oleh otoritas terkait dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dapat memberikan hasil terbaik.

2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya menyampaikan informasi dari

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. Dengan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami pokok-pokok kegiatan penguatan masyarakat.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Fokus pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selama perjalanan ini masyarakat mengikuti kegiatan sebagai berikut:

a) Selidiki situasi di desa secara partisipatif.

Dengan tujuan untuk memahami dan menemukan potensi, permasalahan dan peluang yang ada di daerah. Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengoptimalkan pertumbuhan sumber daya pengetahuannya.

b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:

(1) Menganalisa masalah-masalah

(2) Identifikasi alternatif pemecahan masalah

(3) Identifikasi sumberdaya yang ada di lokasi pemberdayaan

(4) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

c) Rencana pelaksanaan kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun kemudian dipraktekkan bersama dengan dukungan dan pendampingan pendamping.

d) Pemantauan dan evaluasi partisipatif

Dengan berpartisipasi aktif dalam pemantauan terus menerus terhadap proses dan hasil kegiatan, tindakan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tahapan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan proses tersebut mencapai tujuannya.

4) Kemandirian Masyarakat

Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka arah kemandirian masyarakat adalah dengan membekali mereka dengan keterampilan agar mereka dapat menjalankan usahanya sendiri. Dengan kata lain, sebelum lembaga yang bersangkutan sudah melaksanakan program dan meninggalkan lokasi pemberdayaan masyarakat. Maka harus ada jaminan apakah masyarakat di lokasi tersebut dapat melanjutkan pemberdayaan, apabila tidak adanya masyarakat yang melanjutkan maka kegiatan pemberdayaan akan berhenti setelah lembaga yang bersangkutan pergi meninggalkan masyarakat di lokasi tersebut.

Menurut Suharto (1997) dalam Madikanto dan Soebiato (2013: 171) mengemukakan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini mengacu pada dimensi pemberdayaan yang dapat dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan 5P, yaitu:

- a) **Potensi:** menciptakan suasana atau suasana yang mengandung potensi maksimal yang dimiliki seseorang. *Empoderamento* menciptakan hambatan budaya dan struktural yang membatasi masyarakat.
- b) **Pemberdayaan:** Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan diharapkan dapat memperkuat keterampilan dan rasa percaya diri masyarakat miskin serta menunjang kemandirian mereka, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c) **Perlindungan:** Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan khususnya kelompok yang paling lemah agar tidak digulingkan oleh kelompok yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk mencegah persaingan tidak sehat antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah dan untuk

mencegah kemungkinan eksploitasi kelompok yang lebih kuat sehingga merugikan kelompok yang lebih lemah. Pemberdayaan harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang merugikan kelompok terkecil dalam masyarakat..

- d) Dukungan: Hal ini mencakup pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin dapat memenuhi peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan dengan lebih baik. Pemberdayaan diharapkan dapat memberikan dukungan agar masyarakat tidak semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan: mengacu pada pemeliharaan kondisi yang menguntungkan sehingga distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat tetap seimbang. Pemberdayaan harus menciptakan keselarasan dan keseimbangan serta memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi.

2.1.2 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

2.1.2.1 Pengertian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pasal 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa PKK adalah organisasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat. Misi PKK adalah membantu pemerintah desa dan kecamatan meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan keluarga terpelajar, sejahtera, berkemajuan, mandiri dan harmonis. PKK juga berperan penting dalam mengembangkan potensi perempuan dan perannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lebih lanjut, PKK memegang peranan penting dalam pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang mencakup partisipasi aktif masyarakat.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Indonesia. PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh secara organik dari masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang berupaya mewujudkan visi keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur hidup sehat menghasilkan kekayaan secara fisik dan mental.

Peran PKK dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) sejalan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak dapat diabaikan, bahkan dalam peran tradisional mereka sebagai istri, ibu, dan ibu rumah tangga. Selain itu, peran transisi perempuan juga mencakup mereka sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja, dan sebagai pilar pendukung dalam proses pembangunan.

PKK merupakan gerakan pembangunan nasional yang tumbuh secara organik dan berkembang dari akar rumput, menjalankan kepemimpinan oleh, untuk, dan melalui masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan keluarga.

2.1.2.2 Visi Misi Penguatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Visi: Mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, serta sehat jasmani dan rohani.

Misi :

- 1) Meningkatkan pendidikan karakter dalam keluarga melalui pendalaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong serta pemajuan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Peningkatan taraf pendidikan dan ekonomi keluarga terjadi melalui

beberapa tahapan, antara lain penguatan keterampilan dan pengembangan usaha koperasi.

- 3) Meningkatkan kesehatan keluarga, melindungi lingkungan dan perencanaan berkelanjutan merupakan inti dari upaya-upaya ini.
- 4) Untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan PKK perlu dilakukan perbaikan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.2.3 Program Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meliputi mobilisasi masyarakat dan pelatihan pelaksanaan sepuluh program inti.

- 1) Memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila
- 2) Semangat gotong royong
- 3) Keamanan pangan
- 4) Memenuhi kebutuhan sandang
- 5) Pengelolaan dan pengelolaan properti
- 6) Pendidikan dan pengembangan keterampilan
- 7) Pelayanan kesehatan keluarga
- 8) Pengembangan kehidupan koperasi
- 9) Perlindungan lingkungan
- 10) Keluarga berencana yang sehat

2.1.3 Sumber Daya Pangan Keluarga

2.1.3.1 Pengertian Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, pangan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Hal ini mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau produksi makanan atau minuman. Pangan olahan adalah produk makanan dan minuman yang telah melalui proses tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan.

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting dan upaya pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu unsur kunci dalam mencapai potensi manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh semua makhluk hidup. Setiap orang memerlukan pangan sebagai sumber berbagai zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Setiap jenis makanan mempunyai komposisi gizi yang berbeda-beda, sehingga masyarakat memerlukan makanan yang bervariasi untuk menjamin penyerapan zat gizi secara lengkap dan optimal.

2.1.3.2 Bahan Pangan

Bahan pangan adalah berbagai jenis bahan yang dapat dijadikan bahan pangan, harus aman, mempunyai rasa yang enak dan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Bahan makanan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1) Bahan Pangan Nabati

Senyawa tumbuhan merupakan unsur hara yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan nabati dapat dikonsumsi setelah diolah atau dikonsumsi langsung. Jenis pangan ini mengandung beberapa zat gizi penting bagi kesehatan manusia, seperti vitamin, mineral, serat, karbohidrat, kalsium, zat besi dan protein.

Bahan pangan nabati dibedakan menjadi dua kategori yaitu bahan pangan yang berasal dari tumbuhan pekarangan dan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan pangan.

- Tanaman Hortikultura

Ini adalah hasil dari praktik pertanian modern. Tanaman hortikultura yang dimanfaatkan sebagai pangan antara lain buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh sayuran tersebut antara lain sawi, bayam, wortel, kangkung, kangkung, buncis, selada, dan masih banyak variasi lainnya.

- Tanaman pangan

Tanaman pangan memainkan peran penting sebagai penyedia pangan utama yang menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Berbagai jenis tanaman pangan yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan antara lain sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

- 2) Bahan Hewani adalah sumber makanan yang berasal dari hewan dan dapat diolah untuk dikonsumsi manusia. Makanan hewani dianggap sebagai sumber protein dan lemak. Kandungan protein pada makanan hewani umumnya tinggi dan dapat membantu mendukung kesehatan dan perkembangan otak. Sebelum dikonsumsi, makanan yang berasal dari hewan biasanya melalui beberapa proses pembuatan. Ada empat kategori bahan pangan asal hewan yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari: daging, ikan, telur, dan susu.

2.1.3.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan pangan suatu keluarga melalui penyediaan pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata, dan mudah dijangkau dengan harga terjangkau.

Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau masyarakat, namun tanggung jawab kita semua. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah mempunyai tugas mengatur, mengarahkan, memantau dan mengendalikan ketersediaan pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat juga berperan penting dalam menjamin perlindungan konsumen pangan sesuai dengan persyaratan hukum.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga adalah kemampuan untuk menyediakan pangan secara berkelanjutan kepada setiap anggota rumah tangga dalam jumlah, kualitas dan variasi yang sesuai dengan

kondisi lingkungan dan budaya setempat melalui produksi atau pembelian mereka sendiri. Hal ini untuk memastikan anggota keluarga menjalani hidup sehat dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif.

2.1.4 Bangun Penyusunan Rencana Pengelolaan Pangan Keluarga Desa (BUNDA MENYAPA)

2.1.4.1 Pengertian Program Bunda Menyapa

Bunda Menyapa merupakan singkatan dari Bangun Desa *Organizing Family Food Resources*, sebuah inisiatif pembangunan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan pertanian di tingkat rumah tangga dan desa. Program ini merupakan bagian nyata dari misi keempat pembangunan Kabupaten Kuningan yang bertujuan untuk mewujudkan visi “Kuningan Sejahtera, Desa Agamis Pinunjul (Maju)” pada tahun 2023.

2.1.4.2 Tujuan dan Sasaran Program Bunda Menyapa

Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mutu hasil pertanian, pengolahan pangan dan konsumsi masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang dimiliki keluarga di pedesaan. Fokus dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan penggunaan lahan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian di tingkat rumah tangga.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan praktik keluarga tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA).
- 3) Lebih beragamnya pengolahan produk dan bahan pertanian dengan memperhatikan standar B2SA.

2.1.4.3 Pihak yang terlibat dalam Program Bunda Menyapa

Sebagai program multipihak berbagai pihak dengan peran dan fungsi berbeda turut ambil bagian dalam Bunda Selamat, antara lain:

- 1) Pemerintah daerah, yaitu kantor spesialis dan kecamatan, bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan teknis dan dukungan administratif

kepada kelompok sasaran/keluarga.

- 2) Tim penggerak PKK. Badan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan penentuan lokasi dan penerima kegiatan, memberikan bimbingan mengenai kesejahteraan keluarga, dan memotivasi peserta untuk berpartisipasi.
- 3) Desa bertindak sebagai perantara lokal, memberikan dukungan teknis, motivasi dan pemantauan kepada penerima kegiatan.
- 4) Keluarga yang dikoordinasikan oleh Posyandu merupakan peserta kunci sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program/kegiatan Bunda Menyapa.

2.1.4.4 Bentuk Kegiatan dalam Program Bunda Menyapa

Program Bunda menyapa meliputi berbagai kegiatan berikut:

- 1) Dukungan untuk produksi hortikultura dan benih (buah-buahan dan sayuran), perikanan dan peternakan untuk meningkatkan pengelolaan keluarga di wilayah tersebut.
- 2) Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang konsumsi pangan sesuai kriteria B2SA.
- 3) Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan diversifikasi pengolahan pangan (hasil pertanian) di tingkat rumah tangga.
- 4) Bantuan pangan kepada keluarga yang terkena dampak kerawanan pangan.
- 5) Lomba penampilan antar keluarga dan kelompok (Posyandu) peserta Program Menyapa Ibu

2.1.4.5 Struktur Organisasi Program Bunda Menyapa

Program ini akan dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan struktur organisasi yang sederhana dan hierarkis mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

- 1) Satuan Kerja Kabupaten (Satker) berperan sebagai kelompok kerja dan mengkoordinasikan kebijakan dan strategi di bawah arahan pimpinan daerah. Dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kepala Dinas Teknis, dan Kepala Daerah. Tanggung jawab utamanya meliputi

perencanaan, identifikasi dan pengendalian program di seluruh distrik.

- 2) Satuan Kerja Kecamatan (Satker) berperan sebagai kelompok kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bawah kepemimpinan camat. Dikelola oleh tim penggerak PKK kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) dan kepala desa di lokasi kegiatan. Tugas utamanya meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di seluruh kantor.
- 3) Satuan Kerja Desa (Satker) menjadi kelompok kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bawah kepemimpinan kepala desa. Dikelola oleh tim PKK desa, pelaksana UPTD, keluarga angkat dan tokoh desa. Tugas pokoknya adalah melaksanakan seluruh kegiatan program Menyapa Ibu.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

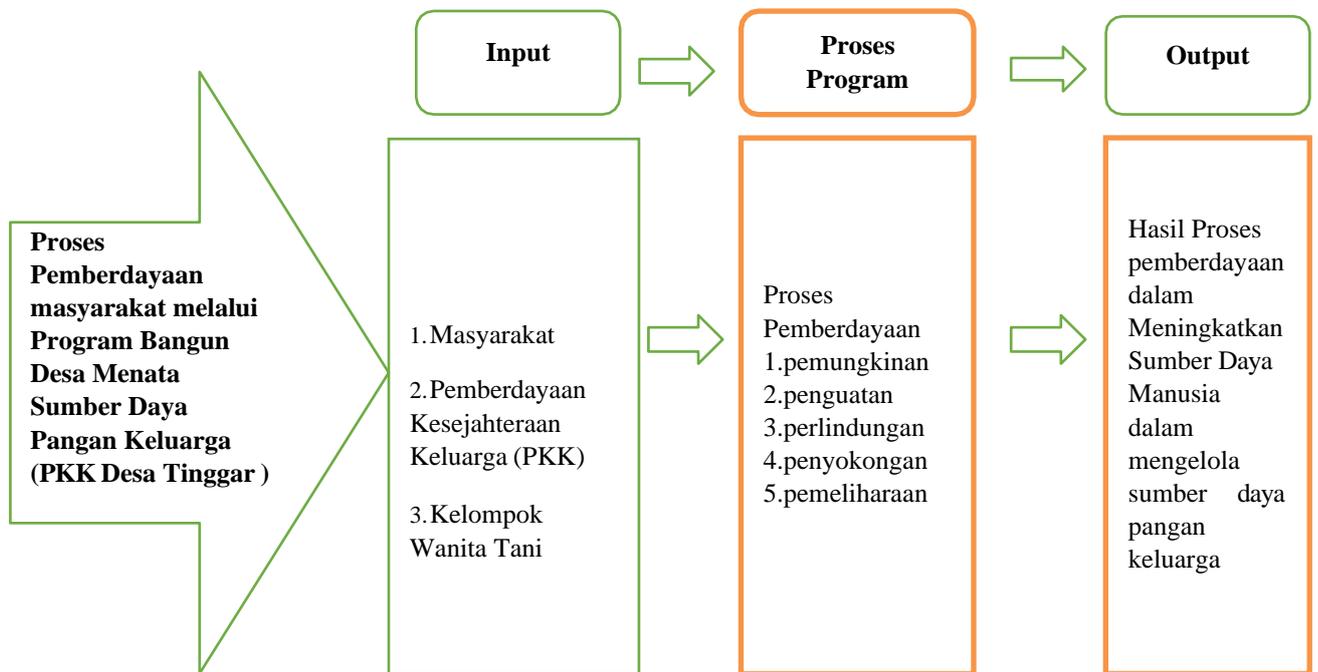
Terdapat beberapa temuan penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan penelitian peneliti, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Shalifah dalam jurnal dengan judul Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini menunjukkan bahwa partisipasi PKK dalam mendukung program negara belum optimal, hal ini didasarkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi serta belum optimalnya peran pemerintah terhadap kelompok PKK di Desa.
- 2) Menurut Khiftiyah dan Nilamsari dalam jurnal dengan judul erkait dengan peran Partai Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program pemerintah di Kota Bontang, dapat disimpulkan bahwa komitmen PKK dalam mendukung program pemerintah belum mencapai titik optimal menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, walaupun berada dalam kondisi pandemic covid-19, walaupun banyak terjadi kelemahan dan kekurangan tapi ini menunjukkan bahwa PKK dapat diberdayakan dengan lebih optimal lagi apabila dibina dan dilakukan pendampingan dengan baik dan benar.

- 3) Menurut Sari dan Irawati dalam jurnal bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Berkelanjutan) Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Ketahanan Pangan” dapat disimpulkan bahwa kegiatan P2L merupakan program strategis untuk optimalisasi pemanfaatan lahan bertingkat. Sebagai sumber pangan dan gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga.
- 4) Menurut Anisahaq, Hanani dan Syafrial dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Mendukung Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL) untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga. Menyimpulkan Program KRPL sudah dapat diterima dengan baik di masyarakat, namun memerlukan waktu untuk sampai ke tahap Kemandirian masyarakat dalam mengelola sendiri karena memerlukan seseorang yang dapat menjadi tokoh.
- 5) Menurut Edi Tando dalam jurnal yang disimpulkan bahwa pengembangan Model Kawasan Domestik Pangan Berkelanjutan (m-KRPL) di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kebun sayur dalam penerapan teknologi produksi sayuran organik.

2.3. Kerangka Konseptual

Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2007) mengacu pada model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama. Kerangka konseptual berfungsi sebagai alat berpikir peneliti ketika melakukan penelitian. Gambar berikut menggambarkan kerangka konseptual kajian pemberdayaan masyarakat melalui program Bangun Desa dalam pengelolaan sumber daya pangan rumah tangga yang diikuti oleh PKK Desa Tinggar.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka terdapat pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program membangun desa menata sumber daya pangan keluarga di Desa Tinggar?